

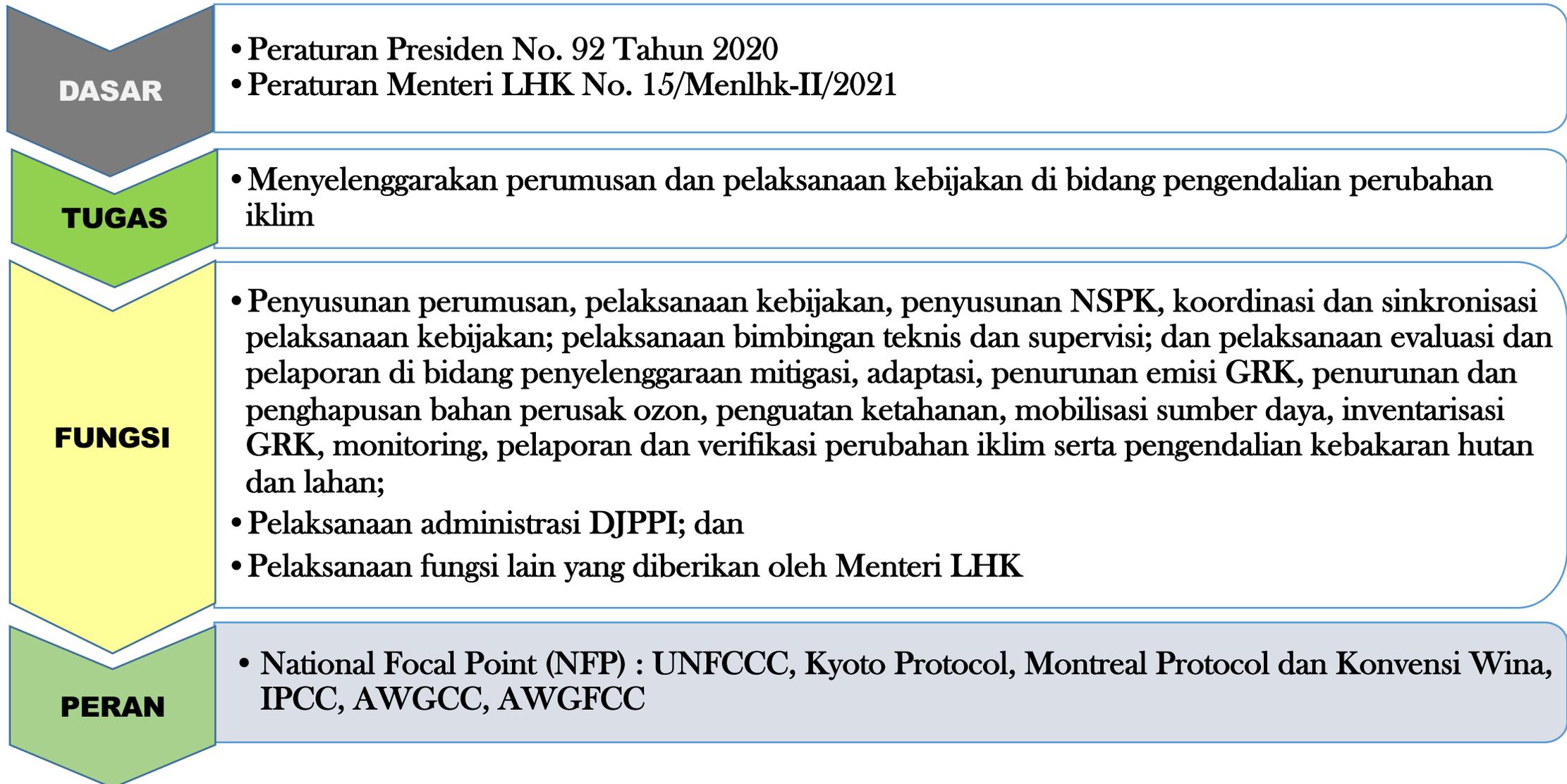


RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

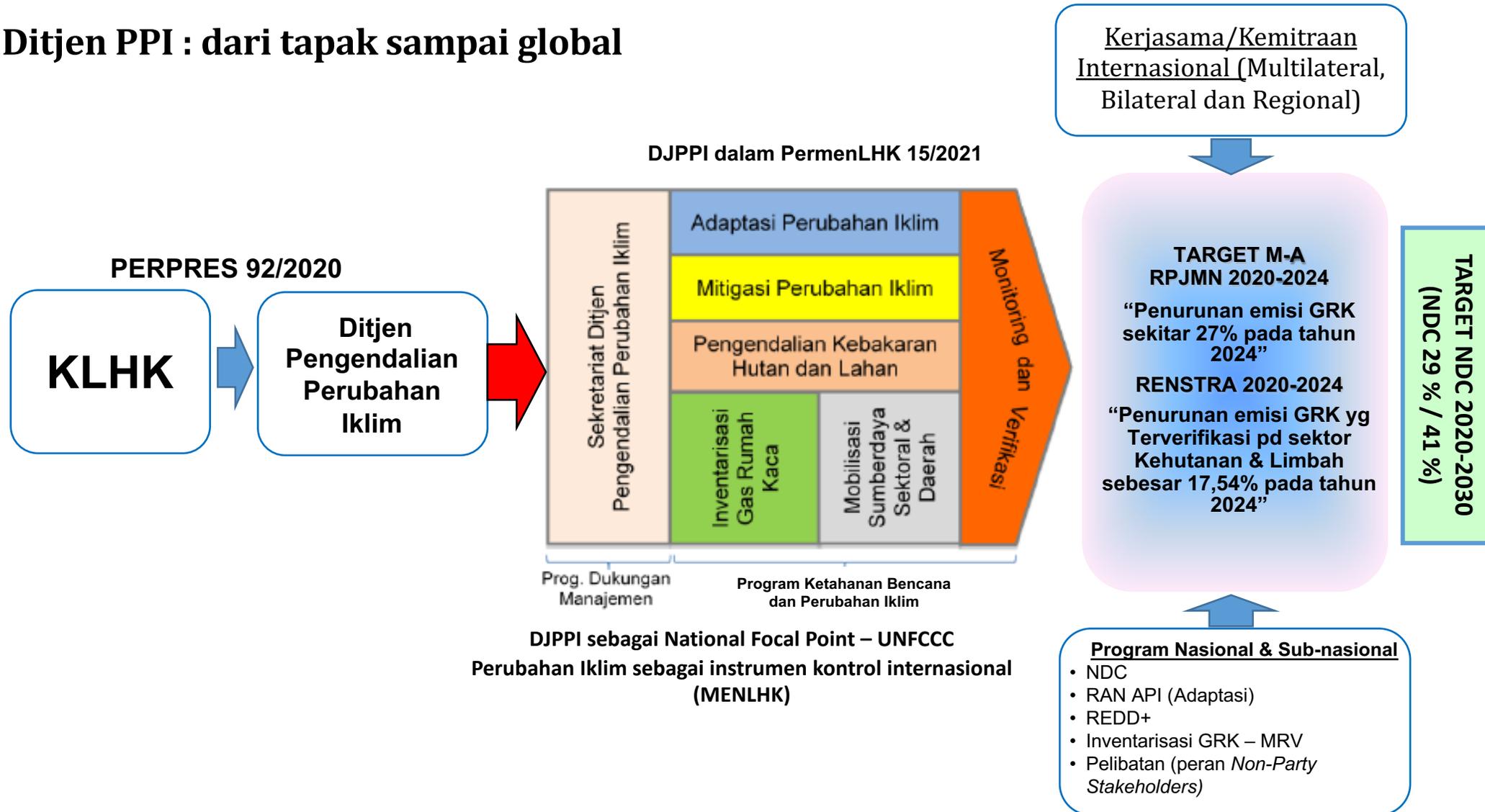
6 APRIL 2022

PENDAHULUAN





Ditjen PPI : dari tapak sampai global



**TINDAK LANJUT
HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI IV DPR RI
TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020**

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

Komisi IV DPR RI mendorong pelibatan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak perguruan tinggi dalam pemberian edukasi kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan tentang bahaya penyiapan/pembersihan lahan dengan cara membakar.

- Membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan tokoh organisasi keagamaan di Indonesia untuk dapat memberikan dukungan mengenai materi kampanye pencegahan karhutla
- Di tingkat tapak para tokoh agama dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam kegiatan Masyarakat Peduli Api (MPA) atau MPA- Paralegal.
- Fatwa MUI Nomor : 30 Tahun 2016 ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Juli 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya
- Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) Berkesadaran Hukum (Paralegal) di wilayah rawan karhutla. Tahun 2022 sebanyak 12 desa, tahun 2021 28 desa baru, dan tahun ini rencana 20 desa baru.

Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Desa dan Kelurahan di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan untuk melakukan penguatan kelembagaan di tingkat tapak dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) di yang nantinya akan terus mendapatkan pembinaan dari Manggala Agni.

- Tahun 2020, KLHK bersama-sama dengan Pemerintah Desa melakukan pembentukan/pembinaan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di Riau sejumlah 15 desa.
- Tahun 2021 sebanyak KLHK bersama-sama dengan Pemerintah Desa melakukan pembentukan/pembinaan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di Riau sejumlah 15 desa.
- Berdasarkan data, telah dibentuk 54 KMPA dari 2016-2021 berjumlah 1380 orang yang terdiri dari pemuda-pemudi daerah di Riau dan Kepulauan Riau

Tim Komisi IV DPR RI menilai tidak ada keseriusan dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla).

- Jambi menetapkan Status Siaga Darurat dalam rangka penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang berlangsung selama 90 hari kalender, terhitung dari 29 Juni sampai 26 September 2020.

Tim Komisi IV DPR RI meminta Pemda dan KLHK memperketat perijinan perusahaan dan melibatkan unsur wilayah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap perusahaan agar tidak menelantarkan lahan dan melengkapi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang menjadi syarat membuka lahan perkebunan

- Dikeluarkannya Surat Perintah tentang pemberian peringatan pemberitahuan kepada penanggung jawab perizinan berusaha atau pemegang izin konsesi hutan dan perizinan berusaha konsesi penggunaan /pemanfaatan hutan pada APL oleh Dirjen Gakkum

Tim Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan persiapan dan penguatan untuk menghadapi ancaman Karhutla tahun 2020 dimana diprediksi akan terjadi Elnino yang lebih panjang dan panas (seperti tahun 2015).

- Tiga klaster pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu:
 1. Analisa Iklim dan Langkah → Monitoring cuaca secara kontinu dengan sumber informasi dari BMKG wajib dilaksanakan oleh semua pihak,
 2. Pengendalian operasional → Di tingkat tapak melalui Pembentukan Satuan Tugas Terpadu yang timnya terdiri dari Manggala Agni, Babinsa, Bhabimkamtibmas, Masyarakat Peduli Api, Kepala Desa serta tokoh masyarakat melaksanakan deteksi dini.
 3. Pengelolaan Landscape; → Seluruh stakeholder yang mengelola kawasan hutan atau lahan khususnya pada lahan gambut harus melaksanakan pengendalian pengelolaan gambut dengan memperbaiki Rencana Karya Tahunan (RKT), Rencana Karya Dua puluh tahun (RKD) serta mengelola areal gambutnya dengan memasang alat monitoring tinggi permukaan air tanah gambut, sehingga setiap saat dapat informasi kondisi real di lapangan guna dilakukan penanganannya.

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMSEL

Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk memberikan solusi kepada masyarakat akan pembakaran hutan maupun lahan sehingga Karhutla di masa yang akan datang dapat diminimalkan seefisien mungkin.

- 1. Memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menanggapi kebakaran hutan dan lahan sejak Januari 2020, antara lain: sosialisasi, penyadartahuan bahaya kebakaran hutan dan lahan, peningkatan kapasitas personil, peningkatan kapasitas peralatan, patroli, deteksi dini, pemadaman dini, dan upaya lain
- 2. Memantapkan mekanisme penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan sehingga penetapan status keadaan darurat dapat dilaksanakan secara tepat
- 3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Komisi IV DPR RI merekomendasi kepada Pemerintah agar setiap 1 ha terdapat 10 pemuda yang direkrut untuk memberdayakan dan dilibatkan secara langsung dalam menjaga keamanan hutan dan lahan, agar dapat mengurangi karhutla yang sering terjadi setiap tahunnya.

- Tahun 2020, KLHK bersama-sama dengan Pemerintah Desa melakukan pembentukan/pembinaan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di Riau sejumlah 1 desa.
- Tahun 2021 sebanyak KLHK bersama-sama dengan Pemerintah Desa melakukan pembentukan/pembinaan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di Riau sejumlah 5 desa.
- Berdasarkan data, telah dibentuk 28 KMPA dari 2016-2021 berjumlah 630 orang yang terdiri dari pemuda-pemudi daerah.

Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah untuk memberikan Hak Pengelolaan Hutan Adat atau Hutan Sosial bagi Masyarakat Adat Kalimantan Tengah dalam rangka kelestarian hutan dan keberlanjutan ekosistem.

- Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang pembukaan dan pengelolaan lahan bukan gambut untuk masyarakat adat Kalimantan Tengah sesuai dengan izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA DJPPI
TAHUN 2023**

DITJEN PPI

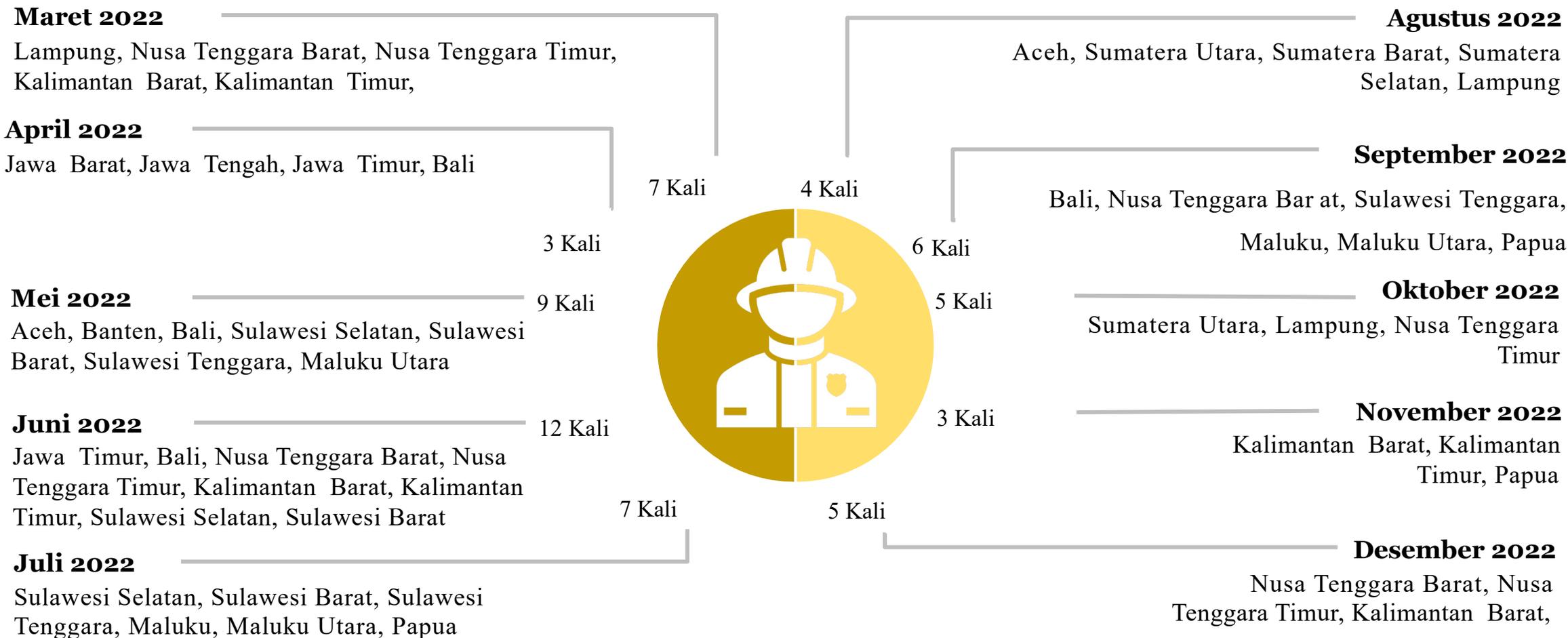
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	BELANJA OPERASIONAL		BELANJA NON OPERASIONAL			JUMLAH (Rp.) x 1.000	KETERANGAN
	Belanja Pegawai	Belanja Operasional	MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL (PN 6)	PRIORITAS BIDANG		
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM: KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	-	-	-	208.964.997	39.540.490	248.455.487	
Kegiatan: Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-	8.265.000	8.265.000	Alokasi pagu anggaran Proklam/RO Kampung Iklim sebesar 4,35 M dengan target 6.500 Kel. Masy
Kegiatan: Mitigasi Perubahan Iklim	-	-	-	14.942.800	10.925.490	25.868.290	Alokasi pagu anggaran RO Data Pemantauan Aksi Mitigasi sebesar 4.2 M dlm rangka mendukung penguatan pemantauan aksi mitigasi
Kegiatan: Inventarisasi GRK dan MPV	-	-	-	-	7.975.000	7.975.000	Alokasi pagu alokasi anggaran untuk RO Fasilitasi di tingkat Sub nasional per UPT sebesar 250 juta dlm rangka mendukung arahan Menteri LHK utk penguatan penghitungan penurunan emisi GRK
Kegiatan: Mobilisasi Sumberdaya untuk Perubahan Iklim	-	-	-	-	12.375.000	12.375.000	Alokasi pagu alokasi anggaran termasuk untuk kontribusi KLHK/DJPPPI dalam Organisasi Internasional sebesar > 3 M
Kegiatan: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	194.022.197	-	194.022.197	Alokasi pagu anggaran Kegiatan Dalkarhutla terdiri dari: a. Pencegahan Karhutla sebesar 105,50 M (2570 Kel. Masyarakat) b. Pemadaman Darat sebesar 13 M (1200 operasi) c. Pemadaman Udara sebesar 8 M (50 operasi)
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN	58.878.839	41.730.790	-	-	44.651.000	145.260.609	Alokasi pagu alokasi anggaran Program Dukman sesuai dengan asumsi Jumlah ASN eksisting 2021, formasi ASN (PNS & P3K 2022), Tunkin 70%, dan Aset BMN bertambah, dan pembangunan kantor UPT BPPIKHL di Kalimantan dan Maluku Papua
J U M L A H	58.878.839	41.730.790	-	208.964.997	84.191.492	393.716.116	

Anggaran Belanja untuk Masyarakat

- Untuk TA 2022 Direktorat Jenderal PPI tidak terdapat anggaran hibah untuk masyarakat (Belanja 526);
- Terkait anggaran berbasis masyarakat terdapat kegiatan yaitu sosialisasi dan Bimbingan teknis kepada masyarakat untuk komponen kegiatan :
 - a. Kampung Iklim (Proklim) dengan target 6.500 kel masyarakat; dan
 - b. Pencegahan Karhutla melalui Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA -MPAP), dengan target 2.570 kel masyarakat.

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

“Sosialisasi Program Kampung Iklim dan MPA terkait KARHUTLA”



PROGRAM PRIORITAS

PROGRAM PRIORITAS :

PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)

Kegiatan ProKlim Untuk Penguatan Aksi Lokal Pengendalian Perubahan Iklim

Adaptasi



Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor



Peningkatan ketahanan pangan



Pengendalian penyakit terkait iklim

Mitigasi



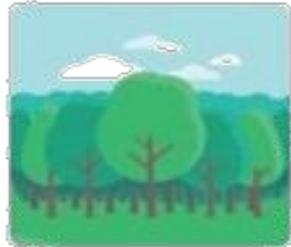
Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair



Penggunaan Energi Baru Terbarukan, konservasi dan penghematan energi



Budidaya pertanian rendah emisi GRK



Meningkatkan/mempertahankan tutupan vegetasi



Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan

Kelembagaan Masyarakat dan Dukungan Keberlanjutan

- Kelembagaan masyarakat
- Dukungan kebijakan
- Partisipasi masyarakat
- Kapasitas masyarakat
- Dukungan sumberdaya eksternal
- Pengembangan kegiatan
- Pengelolaan data aksi
- Manfaat terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan

Proses Kunci Pengembangan ProKlim



- Kebutuhan ProKlim
- aksi adaptasi dan mitigasi PI yang diprioritaskan meliputi biofisik, kelembagaan, dan sosial ekonomi
 - Kebutuhan Sumberdaya

Kebutuhan Sumberdaya
(informasi, institusi/Lembaga, kapasitas, pendanaan, teknologi)

Pelaksanaan ProKlim

1. Komitmen Indonesia untuk membentuk 20.000 kampung iklim sampai dengan tahun 2024. Capaian jumlah lokasi tahun 2012 – 2021 tercatat sebanyak 3.270 lokasi yang tersebar di 33 Provinsi, 386 Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/dialog/workshop/sinergi program lingkup KLHK serta dengan K/L terkait, Pemda, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Mitra Pembangunan sebagai upaya pencapaian target 20.000 kampung iklim
3. Pengukuran kontribusi penurunan emisi GRK berbasis masyarakat di Lokasi ProKlim melalui SPECTRUM
4. Review kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas program
5. Pencermatan data potensi pengembangan ProKlim oleh Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim bersama Balai PPIKHL dengan dukungan eselon 2 terkait lingkup KLHK

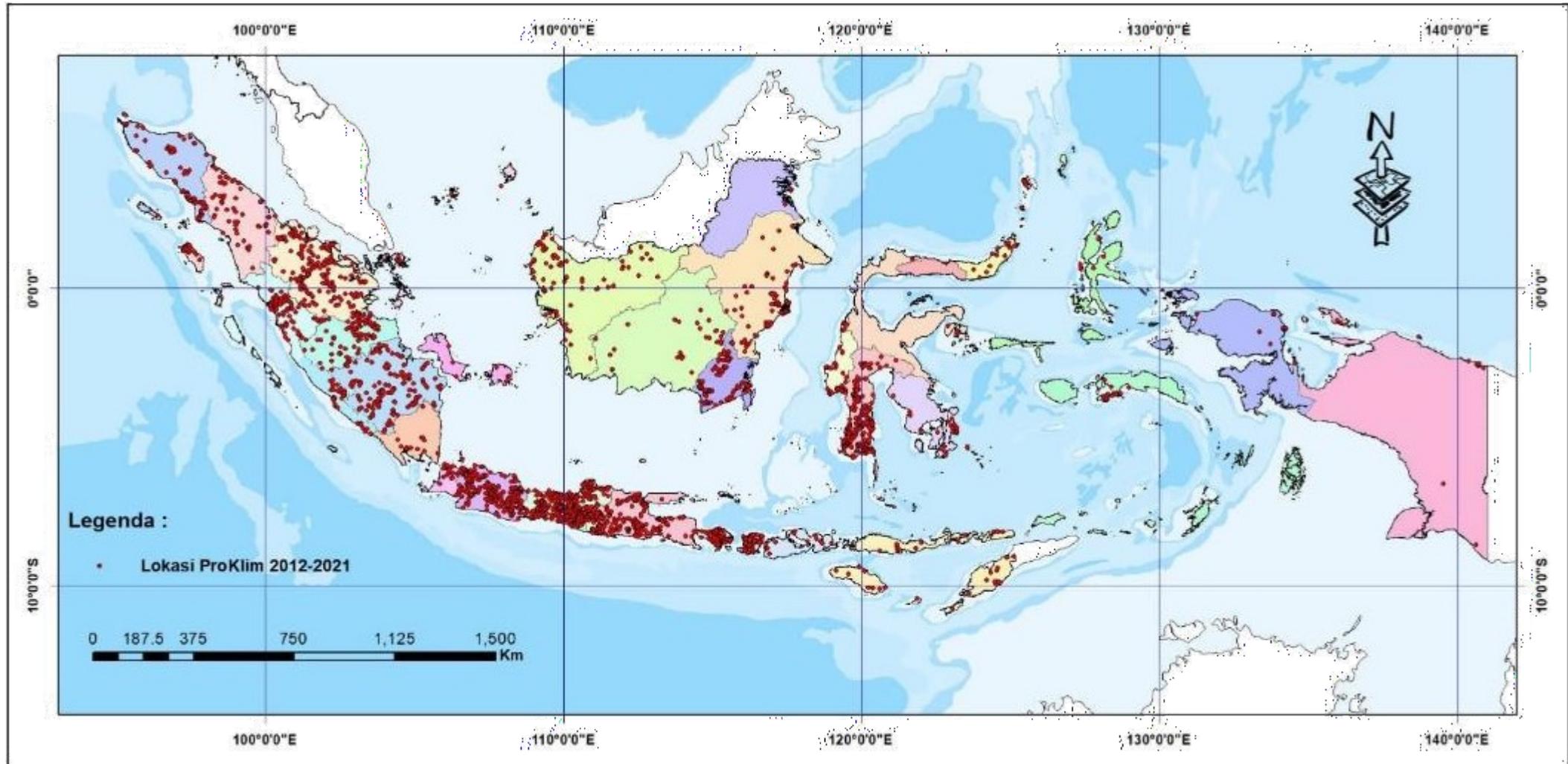


Target ProKlim 2022 s/d 2024



Catatan : luasan Lokasi minimal setingkat RW/Dusun dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau wilayah khusus yang komunitasnya telah melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim

Peta Sebaran Lokasi ProKlim 2012 – 2021 (3.270 lokasi)



PROGRAM PRIORITAS :

**TINDAK LANJUT PERPRES 98/2021
(NILAI EKONOMI KARBON)**

Penjelasan Perjalanan NEK

PARIS2015
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
COP21·CMP11

- Komitmen penurunan emisi GRK global
- Adaptasi perubahan iklim dan *loss and damage*
- Kerangka Transparansi
- *Means of implementation* (Pendanaan, teknologi, peningkatan kapasitas)

PARIS AGREEMENT
(Desember 2015)

Paris: Penyampaian komitmen penurunan emisi GRK tahun 2030 sebesar **29% hingga 41% dibandingkan BaU**



PIDATO PRESIDEN
(Desember 2015)

New York: Penandatanganan *Paris Agreement* pada acara *High-level Signature Ceremony for the Paris Agreement* yang digelar di Markas Besar PBB



PENANDATANGANAN
(April 2016)



Penyampaian perangkat ratifikasi PA (UU 16/2016) dilengkapi dokumen *First NDC Indonesia* ke UNFCCC

RATIFIKASI PA dan NDC
(November 2016)



Submisi *Updated NDC & LTS-LCCR 2050* ke UNFCCC

UPDATED NDC & LTS
(Juli 2021)

PERPRES 98 Tahun 2021
(29 Oktober 2021)

Telah disahkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional

Regulasi NEK sangat penting bagi Indonesia karena memberikan kontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar (*market*) di tingkat global untuk menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan adanya percepatan dalam implementasinya

Venue – Scottish Event Campus



DELEGASI INDONESIA PADA COP26 GLASGOW 2021
COP26/CMP16/CMA3, SBSTA&SBI
52-55



“Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi Net-Zero Emission dunia. Selain itu, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas inklusif dan adil harus diciptakan.”

(Presiden RI dalam KTT Perubahan Iklim World Leaders’ Summit, Glasgow, 1st November 2021)



ALUR SUBSTANSI PERPRES 98 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET NDC DAN PENGENDALIAN EMISI KARBON DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL





HAL-HAL YANG DIATUR DALAM RPERMEN NEK dan NDC untuk pemenuhan mandat Perpres 98/2021

Mekanisme SPE

- Penyusunan Design Alur Mekanisme Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK (SPE) dalam SRN PPI.
- Mekanisme SPE/ICER ini dirancang sebagai tools dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.



Integrasi System

- Intergrasi dengan existing system yang dibangun di internal KLHK dan K/L
- rujukan nasional dan internasional dalam satu data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim

Penguatan Skema MRV

- Pengembangan data umum dan Data Teknis yg tertuang dalam DRAM (Dok Rancangan Aksi Mitigasi)
- Penambahan database pelaporan rancana dan pelaksanaan aksi mitigasi oleh Validator dan Verifikator Independen

Carbon Registry

- Informasi daftar pemegang ICER
- Available Unit (Unit tersedia)
- Retired Unit
- Otorisasi

Instalasi Sistem Pengamanan

Perlindungan terhadap **data** digital untuk mencegah akses yang tidak diinginkan (hackers)

Media Center

Merupakan Instrumen untuk memantau status registrasi dan implementasi yang ditampilkan bentuk tampilan laporan grafik, peta Indonesia dan distribusi statistik kegiatan aksi pada suatu periode

Penghindaran Double Counting

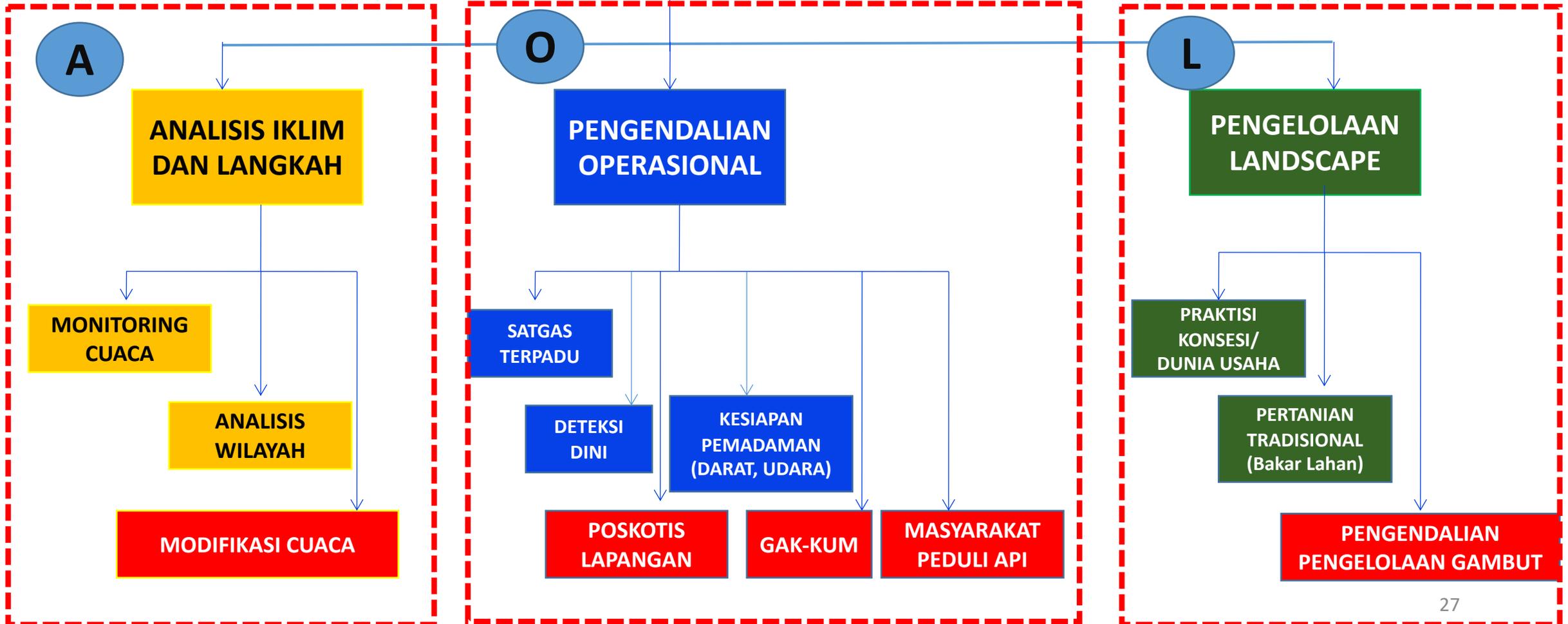
Merupakan tools untuk menghindari penghitungan ganda Aksi Mitigasi

PROGRAM PRIORITAS :

**PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN (KARHUTLA)**

SOLUSI PERMANEN PENGENDALIAN KARHUTLA

UPAYA PENCEGAHAN KARHUTLA SECARA PERMANEN



OPERASI TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA



Sinergitas Para Pihak

Proses Modifikasi Cuaca

Armada Udara BPPT



Sumber: BPPT

MANFAAT TMC:

- Dimanfaatkan untuk membasahi tanah seperti lahan gambut untuk menjaga kelembabannya supaya tidak kering
- Dapat mengatasi masalah kabut asap akibat karhutla
- Dimanfaatkan untuk memadamkan api di areal yang luas dan api besar
- Dapat mengatasi kekeringan pada wilayah tertentu

PENETAPAN STATUS SIAGA KARHUTLA TAHUN 2021

Keputusan Gubernur Riau Nomor: 212/11/2021, tanggal 15 Februari 2021, tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau (15 Februari – 31 Oktober 2021)

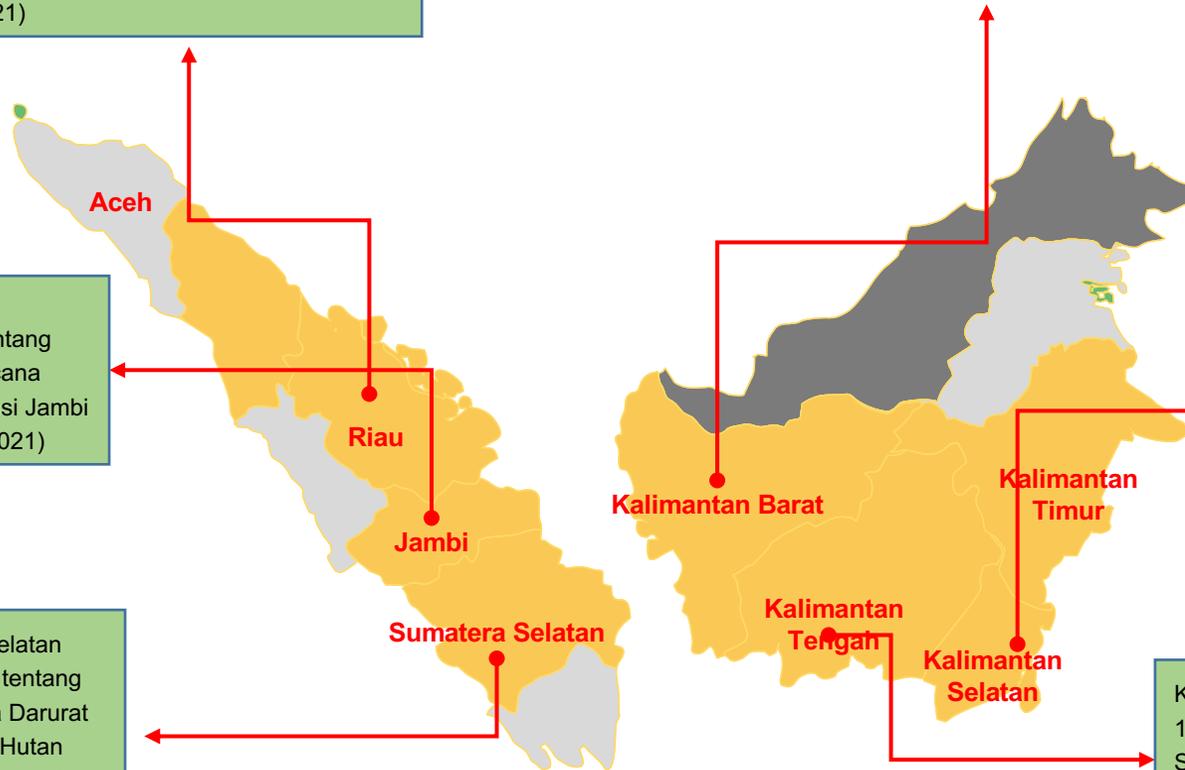
Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 191/BPBD/2021, tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2021 (18 Februari – 31 November 2021)

Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 220/KEP.GUB/BPBD/2021, tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2021 (15 Maret – 31 Oktober 2021)

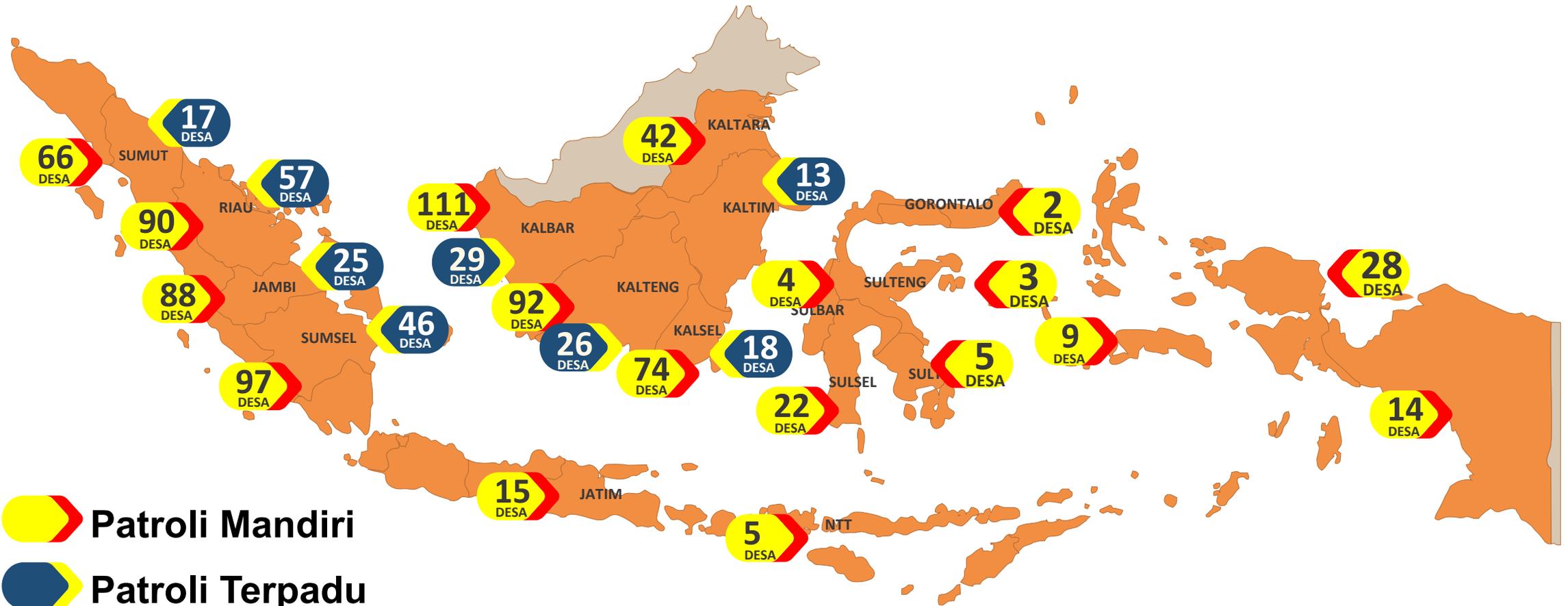
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0405/KUM/2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Provinsi Kalimantan Selatan (1 Juni – 30 November 2021)

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 180/KPTS/BPBD-88/2021 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (9 Maret – 30 November 2021)

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/308/2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, (12 Agustus – 31 Desember 2021)



PELAKSANAAN PATROLI TERPADU DAN PATROLI MANDIRI



- **Patroli Terpadu (melibatkan MPA)** dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia sebanyak 231 posko desa dengan menjangkau 633 desa di sekitar posko (sampai dengan Oktober 2021)
- **Patroli mandiri oleh Manggala Agni** telah dilaksanakan pada 776 posko desa di provinsi rawan (sampai dengan Oktober 2021)

PELAKSANAAN KEGIATAN MPA-PARALEGAL TAHUN 2021



NO.	PROVINSI	LANJUTAN 2020	USULAN BARU 2021	TOTAL
1.	Riau	5	9	14
2.	Jambi	2	1	3
3.	Sumsel	2	3	5
4.	Kalbar	1	6	7
5.	Kalteng	1	6	7
6.	Jabar	1	-	1
7.	Kalsel	-	3	3
TOTAL		12	28	40

KEGIATAN MPA-PARALEGAL MERUPAKAN KERJA BERSAMA KLHK, BNPB, TNI, POLRI, MANGGALA AGNI, MPA, APARATUR DESA, TOKOH MASYARAKAT, MASYARAKAT BERKESADARAN HUKUM

DUKUNGAN PROGRAM / KEGIATAN DITJEN PPI TERKAIT FOLU NET SINK 2030 BERBASIS WILAYAH

UKE I	Program	Kegiatan	Target	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp.)
PPI	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim dengan output (RO) kegiatan:		7,8 Miliar
		1. Data Pemantauan Aksi Mitigasi yang Tervalidasi :		
		a. Koordinasi dan sinergisitas pemantauan mitigasi perubahan iklim	5 Sektor	1,3 Miliar
		b. Pemantauan dan validasi capaian aktual penurunan emisi GRK sektor kehutanan dan limbah	5 Sektor	1,3 Miliar
		c. Pengembangan kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim	1 Dokumen	3,47 Miliar
		d. Implementasi Perangkat REDD plus pada Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD plus	5 Wilayah	1,74 Miliar
		2. Pre Investment Bio Carbon Fund-Initiative Sustainable Forest Landscape di Jambi (HLN BioCF-ISFL)	5 Lembaga (Pemprov Jambi dan 4 UPT KSDAE)	8,94 Miliar
		Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan output (RO) kegiatan:		194 Miliar
		1. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (patrol pencegahan karhutla, sosialisasi dan penyadartahuan pencegahan karhutla, pembentukan dan pembinaan MPA, peningkatan kinerja Manggala Agni, peningkatan sarpras dalkarhutla, pengembangan PLTB, dukungan TMC, perencanaan dan Kerjasama dalkarhutla)	2570 Kel. Masyarakat	173 Miliar
		2. Penanggulangan Karhutla melalui Pemadaman Darat	1200 Kel. Masyarakat	13 Miliar
		3. Penanggulangan Karhutla melalui Pemadaman Udara	50 Operasi (Sortie)	8 Miliar



TERIMA KASIH

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

2022